

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu arah kebijaksanaan yang harus ditempuh khususnya dalam rangka mewujudkan sistim hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berlandaskan keadilan dan kebenaran adalah mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Guna meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga terwujud supremasi hukum adalah dengan menggarap tindakan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan bahkan dianggap sebagai penyakit masyarakat dengan menggunakan hukum pidana.

Begitu juga terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, diperlukan suatu pengaturan yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukumnya. Langkah-langkah positif sebagai upaya menegakkan hukum bagi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan komitmen kebangsaan yang menjadi kewajiban warga negara, hal ini dikarenakan hukum merupakan bagian yang amat penting dan fundamental

dalam menjaga kestabilan, ketenangan, kesejahteraan dan tata tertib kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.¹

Pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya tingkat kemampuan profesional dan integritas kepribadian. Di samping itu, oleh karena masing-masing penegak hukum mempunyai bidang tugas dan kewenangan itu sendiri (*spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi*), maka perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan fungsi penegak hukum menuju cita-cita hukum yaitu terwujudnya kepastian hukum yang berintikan keadilan. Dalam hal ini dikatakan oleh MH. Silaban bahwa :

“Keseluruhan proses penegakan hukum yang mempunyai tahapan dan kewenangan yang berbeda itu saling berkaitan, berhubungan dan berkelanjutan dalam satu keterpaduan mewujudkan cita-cita hukum berupa kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran tersebut. Perwujudan keadilan hukum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan cita-cita dan upaya untuk membentuk keadilan dalam keseluruhan tatanan sosial yang selaras, serasi dan seimbang”.²

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, berarti berbicara mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau disebut pula dengan *politik kriminal*, ialah suatu usaha yang rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan.³ Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah :

(1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

¹ AbdulWahid dan Sunardi, *KUHAP & HAM*, Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2002, hal 1

² MH. Silaban dan Murini Rauf, *Sinkronisasi Pelaksanaan Fungsi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System*, Diskusi Hukum, Fakultas Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25-26 Juli 1990, hal 2.

³ Sudarto, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*”, Sinar Baru, bandung, 1983, hal. 38.

(2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar hukum.⁴

Adapun arti sanksi menurut Jan Remmelink adalah penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengacu keberlakuan norma tersebut.⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana sampai saat ini masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-bab tentang “ketentuan pidana”.

Gambaran ini terlihat bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk “menakut-nakuti” atau “mengamankan” bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena yang demikian dapat dibagi dari sudut kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya dilihat dari batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Dilihat dari hakikat dari kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan

⁴ Muladi dan Barda Nawawi A., “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni, Bandung, 1998, hal. 160.

⁵ Jan Remmelink, “*Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*”, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003, hal. 6.

untuk menanggulangnya, sebagaimana dikemukakan Sudarto, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*rurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁶ Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan *kausatif*” tetapi hanya sekedar “pengobatan *simptomatik*”. Pengobatan *simptomatik* lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat *kontradiktif/pradoksial* dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.

Disamping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan “*fragmentair*”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, *efek preventif* dan upaya perawatan/penyembuhan (“*treatment*”) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (*efek prevensi spesial* maupun *prevensi general*) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat

⁶ Sudarto, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*”, Op. Cit, hal 35.

dilihat juga dari sifat/fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. “Sisi lain yang bersifat struktural/fungsional ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “*obat/remedium*”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“*obat*”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi si terpidana.

Dalam hal penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) pada prinsipnya melalui langkah-langkah yaitu:

- (1) perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- (2) aplikasi oleh aparat penegak hukum dan
- (3) eksekusi oleh aparat pelaksana.⁷

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hal 30

Dari keseluruhan hal tersebut di atas, secara operasional bekerjanya hukum (pidana) melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang didukung oleh sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan. Salah satu subsistem yang memiliki kedudukan sentral adalah pengadilan yang bertugas mengadakan pemeriksaan perkara pidana dan juga mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan

Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana sejak lama telah dilakukan usaha-usaha untuk memperbaharuinya, baik pembaharuan terhadap hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam melakukan usaha-usahanya untuk memperbaharui hukum pidana, pemerintah harus secara sadar berusaha untuk membawa rakyat dan negara ke arah yang dicita-citakan.

Salah satu pembaharuan dalam hukum pidana formil yaitu dengan adanya Hakim pengawas dan pengamat yang selanjutnya disebut Hakim Wasmat yang diatur dalam Pasal 277 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Bunyi Pasal 277 KUHAP diatas, maka dapat diketahui bahwa hakim pengawas dan pengamat mempunyai tugas khusus yaitu membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan eksekusi.

Adapun tugas hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 280 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembinaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan yang dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Dalam peran dan fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Wasmat bertujuan untuk menciptakan pemidanaan yang lebih manusiawi yang sesuai dengan tuntutan dan keadilan masyarakat, memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap terpidana serta sebagai sarana koreksi bagi Hakim atas putusan yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul skripsi “PERAN DAN FUNGSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT) DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI KUDUS”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) di wilayah Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat KIMWASMAT di wilayah Pengadilan Negeri Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran dan fungsi hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) di wilayah Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) dalam melaksanakan peran dan fungsinya di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana dalam hal peranan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) di wilayah Pengadilan Negeri Kudus.

2. Kegunaan Praktis.

Kegunaan praktis dimaksudkan hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan masukan kepada aparat penegak hukum, instansi yang berwenang untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada khususnya dalam hal peran dan fungsi hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) di wilayah Pengadilan Negeri Kudus.

E. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, dan masing-masing bab mempunyai uraian yang berbeda-beda tetapi antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan saling menunjang.

Adapun sistematika selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini mengemukakan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini dibahas tentang Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) di Pengadilan Negeri, Pidana dan Tujuan Pemidaan, Pembinaan Narapidana.

Bab III : Metode Penelitian, meliputi Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Penyajian Data dilanjutkan dengan Metode Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan meliputi Pelaksanaan Peran dan Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat

(KIMWASMAT) di wilayah Pengadilan Negeri Kudus, dan Kendala-kendala yang di hadapi Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) di wilayah Pengadilan Negeri Kudus.

Bab V : Merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan saran penulis.

